

## **Kemiskinan Struktural di Karangasem: Menganalisis Penyebab dan Intervensi Pemerintah**

**Komang Ema Marsitadewi<sup>1</sup>, I Wayan Sudemen<sup>2</sup>  
Universitas Warmadewa<sup>1,2</sup>**

**emarsitadewi@gmail.com<sup>1</sup>, iwayansudemen@gmail.com<sup>2</sup>**

### **Abstract**

*Bali Province is one of the provinces that is not included in the 10 provinces with the highest levels of poor people in Indonesia. Through an economy supported by tourism, Bali has good economic growth. However, behind the splendor of Bali's tourism, Bali still has a number of poor people in several areas, especially areas that are far from the tourism center of Bali. Karangasem Regency is one of the districts that is far from the tourism center of Bali. The poor population in Karangasem in 2020 amounted to 24.69 thousand people. In 2021, the number of poor people in Karangasem will increase to 28.52 thousand people and in 2022, the number of poor people will reach 29.45 thousand people. To be able to answer why you are poor, you must first know the underlying causes of poverty. This is the background for researchers to find out the causes of the Karangasem community becoming poor and to map the types of interventions provided by the government to the community. The methods used in this research were observation, interviews conducted with the Social Service, Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning in Karangasem Regency, the Head of Karangasem Subdistrict, and the Poor Community. Determining informants was carried out using snowball sampling techniques. The intervention carried out by the government in alleviating poverty is poverty which is divided into four clusters, namely Cluster I which focuses on the Family-Based Integrated Social Assistance Program; Cluster II which focuses on Community Empowerment-Based Poverty Alleviation Programs; Cluster III focuses on Poverty Alleviation Based on Empowerment of Micro and Small Economic Enterprises and Cluster IV focuses on other based Poverty Alleviation Programs. In Karangasem District itself, not all cluster programs are implemented. In Karangasem Village, the focus is on two cluster programs, namely the Cluster I Family-Based Integrated Social Assistance Program and the Cluster II Community Empowerment-Based Poverty Alleviation Program.*

**Keywords:** *Poverty, Poverty Alleviation, Government Intervention*

### **Abstrak**

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang tidak masuk kedalam 10 provinsi dengan tingkat penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Melalui perekonomian yang didukung oleh pariwisata, Bali memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Hanya saja, dibalik kemegahan pariwisata yang dimiliki Bali, Bali masih memiliki jumlah penduduk miskin di beberapa daerahnya, terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat pariwisata Bali. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten yang jauh dari pusat pariwisata Bali. Penduduk miskin di Karangasem pada tahun 2020 berjumlah 24,69 ribu jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Karangasem meningkat menjadi 28,52 ribu jiwa dan pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin mencapai angka 29,45 ribu jiwa. Untuk dapat menjawab mengapa miskin harus diketahui terlebih dahulu penyebab yang melatarbelakangi penyebab miskin. Hal ini lah menjadi latar belakang peneliti untuk mengetahui penyebab penduduk karangasem menjadi miskin dan memetakan jenis-jenis intervensi yang diberikan pemerintah kepada penduduk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, Lurah Kelurahan Karangasem, dan Masyarakat Miskin Penentuan informan dilakukan melalui teknik snowball sampling. Intervensi yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yakni penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster yakni Klaster I yang terfokus pada Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga; Klaster II yang penekanan pada Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; Klaster III yang terfokus pada Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil dan Klaster IV penekannya pada Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Program-Program lain Di Kelurahan Karangasem sendiri, tidak semua klaster program dijalankan. Di Kelurahan Karangasem terfokus pada dua program klaster yakni pada Klaster I

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Klaster II Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

**Keywords:** Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Intervensi Pemerintah

## PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Secara mendasar, kemiskinan merupakan keadaan dimana orang atau individu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang dimaksud merupakan kebutuhan pokok manusia berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang dimiliki dibanding pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Suryawati mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004).

Kemiskinan dapat dilihat dari dua jenis kemiskinan yakni kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Kemiskinan makro adalah sebuah metode mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan konsep *basic needs approach* dan pendekatan moneter. Sedangkan untuk mengukur kemiskinan mikro menggunakan konsep multi dimensi dan pendekatan non moneter dalam pelaksanaan perhitungan datanya (Kementerian Keuangan RI, 2023). Indonesia melalui Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). BPS mencatat, perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia bergerak fluktuatif dari tahun 2019-2023.



Grafik 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 25,90 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023, sekitar 9% penduduk Indonesia masih tergolong penduduk miskin.

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang tidak masuk kedalam 10 provinsi dengan tingkat penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Melalui perekonomian yang didukung oleh pariwisata, Bali memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Hanya saja, dibalik kemegahan pariwisata yang dimiliki Bali, Bali masih memiliki jumlah penduduk miskin di beberapa daerahnya, terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat pariwisata Bali.

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten yang jauh dari pusat pariwisata Bali. Penduduk miskin di Karangasem pada tahun 2020 berjumlah 24,69 ribu jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Karangasem meningkat menjadi 28,52 ribu jiwa dan pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin mencapai angka 29,45 ribu jiwa. Untuk dapat menjawab mengapa miskin harus diketahui terlebih dahulu penyebab yang melatarbelakangi penyebab miskin. Hal ini lah menjadi latar belakang peneliti untuk mengetahui penyebab penduduk karangasem menjadi miskin dan memetakan jenis-jenis intervensi yang diberikan pemerintah kepada penduduk.

## **KAJIAN LITERATUR**

Konsep kemiskinan tidak lagi terbatas pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam tulisan dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara dijelaskan bahwa kemiskinan tidak sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga merupakan ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sendiri (Jacobus, Kindangen, & Walewangko, 2018). Hal ini kemudian mengarahkan pada bagaimana melihat kemiskinan yang selama ini hanya terbatas pada keadaan ekonomi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seseorang.

Konsep kemiskinan yang semakin luas dalam melihat kemiskinan mengarahkan kepada dimensi kemiskinan. Dimensi kemiskinan menurut David Cox dalam Ari Muliarta Ginting dan Rasbin membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi yakni (Ginting & Rasbin, 2010):

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi  
Kemiskinan globalisasi merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh adanya arus global. Arus global ini menghasilkan 2 penggolongan negara, yakni negara pemenang dan negara kalah.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan  
Segala bentuk kemiskinan yang merupakan dampak dari adanya sebuah pembangunan. Adapun beberapa jenis kemiskinan yang berkaitan dengan kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan yakni kemiskinan subsisten (kemiskinan yang diakibatkan rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan yang diakibatkan peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan perkotaan).

3. Kemiskinan sosial

Kemiskinan sosial merupakan kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas akibat kondisi sosial yang tidak menguntungkan seperti gender, diskriminasi atau eksploitasi ekonomi. Atau secara sederhana, kemiskinan sosial merupakan kemiskinan yang dipenuhi oleh kelompok-kelompok *subaltern*.

4. Kemiskinan konsekuensi

Kemiskinan yang diakibatkan diluar si miskin seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah pendidik.

David Cox menggolongkan kemiskinan dalam empat kategori dengan penyebab orang tersebut miskin, sedangkan Suryawati menggolongkan kemiskinan dengan melihat bahwa kemiskinan sebagai bentuk multidimensionals (Suryawati, 2004).

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang disebabkan oleh pendapatan sekelompok orang yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang terjadi akibat adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang berdampak pada belum terjangkaunya seluruh masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau standar kesejahteraan.

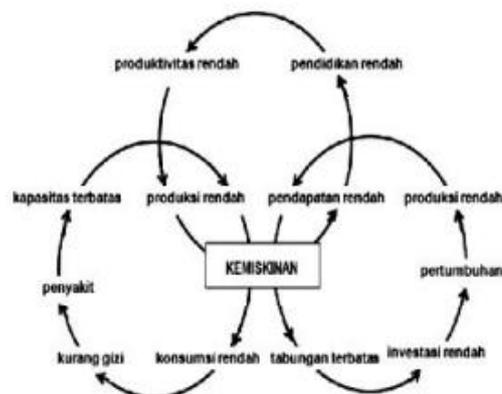
3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Menurut Nuscheler dalam Munker, kemiskinan terjadi disebabkan oleh lingkaran-lingkaran kemiskinan yang terdiri dari tiga pola yang tidak ada ujungnya



Gambar 1. Lingkaran Kemiskinan (Munker.H.H & T. Walter, 2001)

Dalam tiga pola kemiskinan yang digambarkan oleh Munker, bahwa kemiskinan dapat disimpulkan disebabkan oleh: a) pendapatan rendah yang mengakibatkan seseorang tidak memiliki pendidikan yang baik. Sehingga berdampak pada produktivitas rendah; b) keadaan individu yakni kesehatan. Kesehatan yang kurang akan berdampak pada kapasitas seseorang juga menurun. Ketika seseorang tidak dapat berupaya maksimal sesuai kapasitas, maka akan berdampak pada produktivitas rendah. Hal ini juga berujung pada kemiskinan; c) kemampuan untuk berinvestasi rendah sehingga menghambat pertumbuhan. Pertumbuhan yang tidak baik akan berdampak kembali pada produktivitas rendah dan berujung pada kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, Lurah Kelurahan Karangasem, dan Masyarakat Miskin. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *snowball sampling*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional, sehingga mengetahui penyebab kemiskinan merupakan salah satu langkah awal untuk dapat membantu seseorang keluar dari kemiskinan. Apabila melihat pola lingkaran kemiskinan menurut Munker, ketika mengetahui seseorang miskin disebabkan oleh lingkaran kemiskinan apa, maka akan lebih mudah untuk memberikan treatment untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pemerintah Indonesia saat ini masih menggunakan pendekatan ekonomi makro dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. *Basic needs approach* (BSA) masih menjadi cara pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat yang termasuk dalam masyarakat miskin. Lisk dalam Kenneth menjelaskan bahwa BSA setiap negara mempunyai standar kebutuhan pokok yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan dari perbedaan karakteristik ekonomi, sosial, politik, dan budaya (Kenneth A. Reinert, n.d.). BSA menjadi pendekatan yang sangat dekat dengan ekonomi. Hal ini disebabkan BSA masih melihat bahwa pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan kunci dari perubahan ekonomi secara menyeluruh. G R Keeton memperjelas dalam tulisannya bahwa dalam kondisi kemiskinan yang absolut sulit untuk keluar dari kemiskinan melalui cara-cara baru selain secara konservatif atau dengan kata lain yakni memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Meskipun inovasi menjadi sebuah hal yang menjanjikan dalam peningkatan standar hidup, namun juga mengandung risiko kegagalan yang dapat berdampak kembali kepada kemiskinan (G R Keeton, 2008).

Penerapan BSA, mudah dilakukan karena telah memiliki ukuran perhitungan kebutuhan pokok pasti. Hanya saja meskipun penerapan BSA mudah dan luas, BSA mendapat banyak kritik. Kritik utama terhadap BSA ialah kebutuhan pokok masyarakat diputuskan sewenang-wenang oleh beberapa profesional (Ship Ying Wong, 2012). Profesional mengasumsikan kebutuhan pokok orang yang bahkan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Huraerah dalam Nano Prawoto menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan paradigma yang digunakan pemerintah Indonesia dalam penanganan kemiskinan yakni: 1) masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional; 2) lebih bernuansa karitatif ketimbang produktivitas; 3) memposisikan

masyarakat miskin hanya sebagai obyek bukan subyek; dan 4) pemerintah masih memposisikan diri sebagai penguasa daripada fasilitator (Prawoto, 2009).

Berdasarkan pada BSA, pemerintah Karangasem memberikan beberapa intervensi dalam penanganan kemiskinan kedalam beberapa bentuk bantuan program. Berdasarkan berita pada website Kabupaten Karangasem diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster yakni Klaster I Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM); Klaster II Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; Klaster III Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil dan Klaster IV Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Program-Program lain (karangasem.go.id). Empat klaster program ini merupakan program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan dari berbagai bidang agar masyarakat miskin dapat terlepas dari kemiskinan.

Di Kecamatan Karangasem sendiri, tidak semua klaster program dijalankan. Di Kecamatan Karangasem hanya terfokus pada dua program klaster yakni pada Klaster I Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga seperti PKH, dan Raskin. PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan dengan persyaratan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Berikut ialah DTKS di Kabupaten Karangasem.

Tabel 1. DTKS Kabupaten Karangasem April 2023

Kecamatan	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
Wilayah Kosong	6	5
Rendang	16.604	6.093
Sidemen	20.834	7.156
Manggis	22.479	7.718
Karangsem	60.243	19.856
Abang	56.988	18.283
Bebandem	29.530	10.117
Selat	20.668	7.275
Kubu	52.133	16.931
Total	279.485	93.434

Melihat tabel DTKS, Kecamatan Karangasem memiliki jumlah penerima PKH terbanyak dibanding kecamatan lain di Kabupaten Karangasem, yakni sebanyak 60.243 individu. Hal ini merupakan dampak dari luas wilayah Kecamatan Karangasem dan juga penduduk Kecamatan Karangasem yang berasal dari penduduk pendatang yang kemudian menetap lama di Kecamatan Karangasem dengan kehidupan yang dapat digolongkan menengah kebawah. Hal ini pun diungkapkan oleh Lurah Kelurahan Karangasem.

*“penduduk di Kecamatan Karangasem memang banyak yang awal mulanya merupakan penduduk pendatang dari Jawa atau Madura. Lama-lama menjadi penduduk tetap. Awal datang memang dari segi ekonomi kurang. Ekonomi kurang kemudian pekerjaan jadi ya tidak terlalu baik, dan pendidikan pun juga tidak banyak yang bisa sampai sarjana”*

Keadaan penduduk Kecamatan Karangasem yang dimulai dari orang-orang pendatang yang menetap yang hanya memulai kehidupan dengan ekonomi menengah kebawah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik melalui pekerjaan maupun pendidikan. Hal ini sangat terkait dengan bahwa kemiskinan di Kecamatan Karangasem merupakan jenis kemiskinan struktural. Dimana penduduk yang memiliki ekonomi rendah, mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan yang lebih baik ataupun akses mendapatkan pekerjaan yang dapat membantu memperbaiki kualitas hidup.

Tujuan awal adanya PKH untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian dalam mengakses kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan melalui PKH dengan tujuan tersebut. Hanya saja di Kecamatan Karangasem, penerima PKH lebih didominasi oleh kelompok rentan dibandingkan keluarga yang memiliki anak atau anggota keluarga yang berada pada angka produktif. Sehingga apabila dianalisis lebih mendalam, PKH hanya memenuhi tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Belum mengarahkan kepada kemampuan untuk nantinya dapat melakukan perubahan kualitas hidup.



Gambar 2. Salah Satu Keluarga Penerima PKH

Apabila di Kecamatan Karangasem, penerima PKH didominasi oleh kelompok rentan, sehingga tujuan PKH dalam akses pendidikan masih sangat sedikit, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulfady, Gita Susanti, dkk. Penelitian yang dilakukan dalam melihat evaluasi dari PKH di Kabupaten Enkareng memperoleh hasil yang berbeda. Di Kabupaten Enkareng, dengan adanya PKH banyak keluarga yang memiliki anggota dengan umur produktif sekolah dapat melewati jenjang SD, SMP, dan SMA bahkan kuliah (Sulfadli, Susanti, Abdullah, Edy, & Pauzi, 2023). Hal ini tidak dapat disalahkan secara keseluruhan kepada pemerintah Kecamatan Karangasem. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kepala Lingkungan di Kecamatan Karangasem diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Karangasem yang berada di usia produktif lebih

banyak yang memilih untuk bekerja di Denpasar meskipun dengan latar belakang pendidikan SD, SMP, ataupun SMA.

*“disini gak ada pekerjaan soalnya. Paling jadi buruh harian atau mingguan. Jadi anak-anak lebih banyak ke Denpasar atau Badung untuk cari kerja. Iya mungkin emang karena disini gak ada lahan pekerjaan ya. Jadi mereka lebih memilih untuk pergi ke kota.”*

Mencari pekerjaan ke kabupaten lain bisa menjadi pisau bermata dua bagi Kecamatan Karangasem. Apabila seluruh anak-anak lebih memilih untuk bekerja diluar Karangasem, Karangasem akan menjadi tempat yang sulit berkembang karena anak-anak berusia produktif yang juga merupakan generasi perubahan tidak berada di Karangasem. Hal ini merupakan permasalahan yang harus ditemukan penyelesaiannya. Apabila terlalu lama terjadi, Karangasem akan semakin sulit untuk berkembang. Permasalahan lain secara teknis yang dirasakan oleh masyarakat yang juga menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kecamatan Karangasem ialah DTKS yang berubah-ubah. Sehingga masyarakat mengalami kebingungan dalam penerimaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh beberapa masyarakat yang termasuk dalam DTKS.

*“iya saya sebenarnya kurang paham saya dapat bantuan apa saja. Kemaren saya dapat, adik saya tidak dapat. Adik saya hanya dapat beras. Jadi sebenarnya saya tidak paham. Yang penting masih dapat saja saya sudah bersyukur”*

Ketidakesesuaian atau ketidakpastian data memang permasalahan yang tidak hanya terjadi dalam kasus PKH. Ombudsman Republik Indonesia juga menaruh perhatian terkait ketidakrapian DTKS. Padahal DTKP menjadi *big data* yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan jaminan sosial kepada masyarakat. Namun pada faktanya tidak semua pemerintah daerah telah melakukan pemutakhiran data melalui proses verifikasi dan validasi (<https://ombudsman.go.id/>). Hal ini pun diakui oleh pegawai Kecamatan Karangasem

*“iya memang data kita tidak bisa sama dengan apa yang dipegang dinas atau yang dipegang kelurahan. Kami juga kesulitan dalam pengumpulan data. Kadang sudah lama meninggal tapi masih tercantum ke DTKS ataupun padaham masyarakat kurang mampu tapi tidak masuk ke data DTKS.”*

Permasalahan mendasar seperti tidak baiknya data DTKS harus menjadi prioritas penyelesaian oleh pemerintah Karangasem. Sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan target penerima bantuan.

Selain PKH, intervensi yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yakni program Beras Miskin (Raskin). Raskin merupakan program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin melalui pendistribusian beras minimal 15 kg/KK/bulan dengan harga Rp 1.600,00 per kg. Penerima Raskin adalah masyarakat yang telah terdaftar di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) setelah adanya musyawarah di Desa atau Kelurahan masing-masing. Mulai tahun 2007, digunakan data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS sebagai data dasar dalam pelaksanaan Raskin. Dari jumlah RTM yang tercatat sebanyak 19,1 juta RTS, baru dapat diberikan kepada 15,8 juta RTS pada tahun 2007, dan baru dapat diberikan kepada seluruh RTM pada tahun 2008. Dengan jumlah RTS 19,1

juta pada tahun 2008, berarti telah mencakup semua rumah tangga miskin yang tercatat dalam Survei BPS tahun 2005. Jumlah sasaran ini juga merupakan sasaran tertinggi selama Raskin disalurkan. Penggunaan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS – 2008) dari BPS diberlakukan sejak tahun 2008 yang juga berlaku untuk semua program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Bentuk intervensi lain yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin yakni Beras Raskin (Raskin). Realisasi Raskin di Indonesia dengan rentang tahun 2005 - 2007 berkisar antara 1,6 juta ton - 3,2 juta ton. Dengan harga yang dikeluarkan untuk Raskin yakni sebesar Rp.1.000/kg. Pada tahun 2008, harga tembus untuk Raskin berada pada harga Rp 1.600/kg. Raskin ditujukan untuk menguatkan rumah tangga miskin dalam ketahanan pangan. Tidak hanya itu, Raskin juga ditujukan untuk dapat menjaga stabilitas pangan Indonesia pada tahun 2000an. Raskin telah mengurangi permintaan masyarakat akan beras ke pasar sebanyak sekitar 18,5 juta pada tahun 2009. Selain itu, perubahan harga tebus dari Rp.1.000/kg menjadi Rp.1.600/kg juga dengan mempertimbangkan anggaran dan semakin banyaknya rumah tangga sasaran yang dapat dijangkau. Di Karangasem sendiri pada tahun 2017 ini terdapat 260 Kepala Keluarga yang tersasar program tersebut.

Program lain yang dijalankan oleh pemerintah dalam melakukan intervensi penanganan kemiskinan di Karangasem yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan yang telah bekerjasama. BNPT ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi beban pangan penduduk miskin. Bansos BPNT di Karangasem berupa bantuan uang sebesar Rp200.000 per bulan yang dapat digunakan untuk membeli sembako di *e-warung*. Pada tahun 2023 masyarakat Karangasem akan mendapatkan bantuan ini selama tiga bulan berturut-turut, yaitu pada bulan Oktober, November, dan Desember.

Penyaluran bansos ini disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing termasuk di Kabupaten Karangasem. Semua bantuan sosial ini diarahkan untuk membantu masyarakat Kabupaten Karangasem yang membutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, penyaluran BPNT dibantu oleh PT Pos Indonesia. Dimana penduduk yang terdaftar sebagai KPM dapat mendatangi kantor pos untuk mengambil bantuan. Hanya saja permasalahan yang sering terjadi dalam penyaluran bantuan ini adalah banyaknya KPM yang termasuk ke dalam umur usia lanjut yang secara fisik sudah tidak kuat harus ke kantor pos untuk mengambil bantuan.

Program terakhir yang diberikan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ialah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). BLT-DD adalah pemerian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari dana desa untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi dampak ekonomi. BLT-DD ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa yang didalamnya tertuang mengenai penyaluran BLT-DD.

Tabel 2. Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Karangasem

No	Nama Program	Tujuan	Penyaluran
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Disabilitas, Lansia, Anak Sekolah, dan Ibu Hamil	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem membantu dalam proses penyaluran yang seringkali permasalahan yang terjadi adalah ketidakvalidan data dilapangan dan penerima bantuan
2	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Rumah Tangga kurang mampu dalam bentuk beras ataupun dalam bentuk uang yang kemudian dibelanjakan menjadi sembako.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem membantu dalam proses penyaluran dan memonitoring bantuan yang diberikan sudah sesuai tujuan.
3	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)	Lanjutan dari kegiatan BLT DD tahun 2020, adapun target/sasaran adalah lansia dan terdampak covid	Pemerintah Desa melaksanakan penyaluran BLT DD untuk triwulan ke 1 (Januari, Februari, Maret)

Apabila melihat berbagai program dalam menangani kemiskinan diatas, memang dapat dilihat bahwa program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terfokus agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mendasar, belum mengacu pada masyarakat untuk berkembang dan terlepas dari kemiskinan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *The Smeru* diketahui bahwa beberapa program seperti PKH memang telah memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan, terutama kedalam dan keparahan kemiskinan, tetapi tidak terlalu mampu memberikan kontribusi dalam menurunkan ketimpangan (Suryahadi, Kusumawardhani, & Izzati, 2018). Setiap masyarakat miskin juga memiliki tingkat keparahan kemiskinan masing-masing sehingga, bantuan sosial membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok namun tidak membantu keluar dari kemiskinan itu sendiri. Dalam Jurnal *Education and Development* oleh Khotim dan Laia diperjelas bahwa bantuan dalam bentuk PKH memberikan pengaruh positif terhadap penanggulangan kemiskinan. Dimana PKH merupakan bantuan sosial berbentuk uang tunai, sehingga KPM dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam hal pendidikan dan juga kesehatan. Masih dalam hasil penelitian yang sama, diketahui juga bahwa program BPNT berpengaruh negatif terhadap penanggulangan kemiskinan. Karena pada dasarnya BPNT merupakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menekan pengeluaran semata (Fadhli & Nazila, 2023). Ditilik dari hal ini bahwa

pengentasan kemiskinan tidak hanya dapat terselesaikan dengan hanya memberikan program agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai manusia. Secara jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan diperlukan program-program yang saling terintegrasi, tidak hanya mengandalkan pemberian bantuan sosial. Karena bantuan sosial bukan kegiatan yang bertujuan untuk masyarakat dapat berdaya. Berdasarkan konsep pemberdayaan sosial yakni pemberdayaan bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Wujud program pemberdayaan ini adalah pemberian modal yang dapat digunakan oleh masyarakat itu agar mampu keluar dari ketidakberdayaan mereka. Jadi konsep pemberdayaan sosial yang mulai diimplementasikan sekarang ini berbeda dengan Bansos (Kurniawan & Teguh Pamuji Tri Nurhayati, 2015). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bansos lebih menekankan pada masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar sehingga mampu mempertahankan kehidupan sedangkan pemberdayaan sosial lebih mendorong masyarakat miskin untuk dapat berusaha meningkatkan kemampuannya.

Meskipun secara nasional, pemberian bantuan sosial dapat berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan di Indonesia ditemukan bahwa kebijakan bansos baik BPNT, PIP maupun PKH merupakan bantuan yang bersifat *progresif* dan *pro-poor spending*, yakni jumlah manfaat bansos yang diterima kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun masih terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos di Indonesia (Rizki Zul Arfandi & Sumiyarti, 2022). Hal ini diperkuat dengan data dilapangan yang diketahui bahwa data yang saling tumpang tindih sehingga DTKS yang dimiliki oleh Kabupaten Karangasem masih belum dapat mengakomodir seluruh masyarakat miskin di Karangasem

## **PENUTUP**

Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster yakni Klaster I Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga; Klaster II Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; Klaster III Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil dan Klaster IV Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Program-Program lain Di Kelurahan Karangasem sendiri, tidak semua klaster program dijalankan. Di Kelurahan Karangasem terfokus pada dua program klaster yakni pada Klaster I Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Klaster II Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Program-program yang dijalankan di Kelurahan Karangasem merupakan program turunan kebijakan bantuan sosial nasional, yang mana keseluruhan program menargetkan masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh bantuan. Hanya saja kerap terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Hal ini diakibatkan dari DTKS yang dimiliki oleh kelurahan sering tumpang tindih dengan data lainnya.

Berbagai intervensi pemerintah Kelurahan Karangasem yang telah dijalankan membantu masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok. Namun apabila dianalisis lebih mendalam, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin baru pada batas masyarakat miskin tidak kesulitan dalam memenuhi dasar-dasar kebutuhan manusia belum sampai pada tahap masyarakat miskin dapat berusaha atau berdaya hingga dapat

keluar dari kemiskinan. Hanya saja hal ini merupakan langkah awal untuk dapat berusaha atau berdaya karena masyarakat miskin tidak lagi hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok yang telah didapatkan dari bantuan sosial. Kini masyarakat miskin bisa menggunakan penghasilan untuk berinvestasi dalam berbagai bentuk sehingga dikemudian hari dapat berusaha dan berdaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Penjelasan Data Kemiskinan. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html>
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh Implementasi Bantuan Sosial Bpnt Dan Pkh Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 196–202. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>
- G R Keeton. (2008). The Basic Needs Approach: A Missing Ingredient in Development Theory? *Development Southern Africa*, 1(3–4), 276–293.
- Ginting, Ari Mulianta, & Rasbin. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1), 279–312.
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86–103.
- Kementrian Keuangan RI. (2023). Kemiskinan Makro dan Kemiskinan Mikro. Retrieved from <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3155-kemiskinan-makro-dan-kemiskinan-mikro.html>
- Kenneth A. Reinert. (n.d.). The Basic Needs Approach. In Scholar School of Policy and Government (Ed.), *Elgar Encyclopedia of Development*.
- Kurniawan, D., & Teguh Pamuji Tri Nurhayati. (2015). No Title penerapan Model Slow-Swan Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 30(1), 68–75.
- Munker, H. H., & T. Walter. (2001). *Sektor Informal Sumber Pendapatan Bagi Kaum Miskin dalam Menggempur Akar-Akar Kemiskinan*. Jakarta: Takoma-PGI.
- Prawoto, N. (2009). Karakter kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(April), 56–68. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/30659-ID-memahami-kemiskinan-dan-strategi-penanggulangannya.pdf>
- Rizki Zul Arfandi, & Sumiyarti. (2022). Analisis Pembagian Manfaat Atas Program Bantuan Sosial Di Indonesia Tahun 2018. *Media Ekonomi*, 30(1), 1–15. <https://doi.org/10.25105/me.v30i1.10304>
- Ship Ying Wong. (2012). *Understanding Poverty: Comparing Basic Needs Approach and Capability Approach*. Bristol.

- Sulfadli, Susanti, G., Abdullah, M. T., Edy, N., & Pauzi, R. (2023). Evaluasi Dampak Program: Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 3(1), 1–20. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/>
- Suryahadi, A., Kusumawardhani, N., & Izzati, R. Al. (2018). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan. In *SMERU Research Institute*. Retrieved from <http://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Dr.-Asep-Suryahadi-%0AEfektifitas-Program-Bantuan-Sosial-Dalam-Pengurangan-Kemiskinan-dan-Ketimpangan.pdf>
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Jarnasy.

